INOVASI KURIKULUM MADRASAH DI PESANTREN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN CIVIC EDUCATION

Moh. Harun Al Rosid, Eko Budiwono, Mamlukhah
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
E-mail: harun2939@gmail.com. ekobeye31@gmail.com.
mamlukhah0876@gmail.com

Abstract

Reasons for Choosing Side-by-Side, namely: (1) Madrasas need curriculum innovations in order to contribute to the success of madrasa goals that are in line with the objectives of national education; (2) Madrasas have never received civic education assistance from the Banyuwangi district government; (3) Madrasah students need an understanding of civic education, especially insight into the archipelago as a counterweight to understanding religion and nation in the Unitary State of the Republic of Indonesia for the provision of living in a pluralistic society. The approach used is Participatory Action Research (PAR). The conclusion obtained from the results of this service is that the madrasah curriculum innovation at the pesantren is important, given that Islamic religious education at the pesantren contributes greatly to the Republic of Indonesia as a moral fortress as well as a stronghold of radicalism. Positive responses and stakeholder support are also a great motivation for the smoothness and success of the madrasah-based community service program carried out at the largest madrasah diniyah in Banyuwangi district, hoping that it could become a reference and barometer for the madrasah diniyah in Banyuwangi district.

Keywords: Madrasah Curriculum Innovation, Civic Education Implementation

Abstrak

Alasan memilih Dampingan, yaitu : (1) Madrasah butuh inovasi kurikulum guna turut serta mensukseskan tujuan madrasah yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional; (2) Madrasah belum pernah mendapatkan pendampingan civic education dari pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi; (3) Peserta didik madrasah membutuhkan pemahaman civic education khususnya wawasan nusantara sebagai penyeimbang pemahaman beragama dan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia guna bekal hidup di masyarakat yang majemuk. Pendekatan yang digunakan adalah dengan Participatory Action Research (PAR). Kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian ini adalah inovasi kurikulum madrasah di pesantren itu penting, mengingat pendidikan keagamaan Islam di pesantren berkontribusi besar bagi NKRI yakni sebagai benteng moral sekaligus benteng radikalisme. Respon positif serta dukungan stakeholder juga merupakan motivasi besar terhadap kelancaran dan kesuksesan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis madrasah yang dilaksanakan pada madrasah diniyah terbesar di kabupaten Banyuwangi ini, harapannya bisa menjadi rujukan serta barometer bagi madrasah diniyah se-kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci : Inovasi Kurikulum Madrasah, Implementasi Civic Education

A. Pendahuluan

Inovasi kurikulum madrasah yang ada di pesantren sangatlah penting untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan santri dan masyarakat, agar madrasah dipesantren tidak tertinggal dengan perkembangan dan perubahan zaman. Tentunya dalam berinovasi tidak merubah total kurikulum dipesantren, akan tetapi inovasi yang dimaksud adalah penambahan mata pelajaran atau penyisipan nilai-nilai yang diinginkan. Kurikulum yang ada di pesantren terdiri dari tiga aspek utama, yaitu *perencanaan*, *pelaksanaan* dan *evaluasi*.

Perencanaan kurikulum dimulai dengan kegiatan kajian pada aspek kebutuhan (*needs assessment*). Kajian kebutuhan tersebut dihubungkan dengan perkembangan zaman, dimana pendidikan itu berbasis kepada kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai dengan lingkungan santri. Pelaksanaan kurikulum juga mempunyai tiga pendekatan kecerdasan majemuk (*multiple intelligence*) dan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*). Sedang evaluasinya menerapkan penilaian secara universal terhadap semua kompetensi santri (*authentic assessment*).

Kurikulum di pesantren selama ini mungkin masih belum begitu diperhatikan, karena dianggap klasik dan tidak dapat diinovasikan. Jika kita berfikir lebih jauh, ada baiknya bila pesantren membuat sebuah gagasan/ide dalam mengembangkan kurikulumnya. Terkait inovasi kurikulum madrasah pesantren bahwa sebenarnya *civic education* (pendidikan kewarganegaraan) ini juga sangatlah baik bila diterapkan di madrasah pesantren karena nilai yang terdapat pada *civic education* sejalan dengan ajaran agama Islam. Di dalam *civic education* mengandung nilai-nilai beragama, berbangsa dan bernegara *الدين والأمة والدولة* (*al-diyn wal'umat waldawlat*). Hal ini penting sekali guna menghindari pemahaman yang salah dalam beragama. Karena gerakan yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) misalnya: mendirikan negara Islam (*khilafah Islamiyah*) terorisme, etnosentrisme, primordialisme dan lain sebagainya, ini bisa muncul dari pemahaman beragama yang kurang tepat, butuh keseimbangan antara beragama, berbangsa dan bernegara. Maka *civic education* dipandang sangat tepat untuk diterapkan di madrasah pesantren guna memberikan pemahaman konsep beragama, berbangsa dan bernegara bagi peserta didik/santri

di madrasah pesantren sebagai bekal hidup kelak di masyarakat dan sekaligus inovasi kurikulum di madrasah pesantren.

Dari uraian diatas dapat diambil pemahaman bahwa hakikat pendidikan sangatlah penting, baik itu di lembaga formal dan informal. Sistem pendidikan adalah keterpaduan dari seluruh satuan pada aktivitas pendidikan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya guna efektifitas dan efisiensi tujuan pendidikan. Pesantren dengan madrasahnyajuga berkontribusi besar mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka tim pengabdian tertarik untuk melaksanakan pengabdian terkait inovasi kurikulum madrasah pesantren.

Alasan Memilih Dampingan

1. Madrasah butuh inovasi kurikulum guna turut serta mensukseskan tujuan madrasah yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional
2. Madrasah belum pernah mendapatkan pendampingan *civic education* dari pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi
3. Peserta didik madrasah membutuhkan pemahaman *civic education* khususnya wawasan nusantara sebagai penyeimbang pemahaman beragama dan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia guna bekal hidup di masyarakat yang majemuk

Kondisi dampingan yang diharapkan

1. Pesantren di kabupaten Banyuwangi mulai berinovasi pada kurikulumnya tanpa harus keluar dari tujuan dan visi misi pesantren.
2. Kepala madrasah, wakil bidang kurikulum di kabupaten Banyuwangi mempunyai penguasaan dan pemahaman *civic education* yang baik
3. Peserta didik (santri) di kabupaten Banyuwangi memperoleh pemahaman *civic education* yang baik dalam penguasaan wawasan kebangsaan dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
4. Pemahaman konsep wawasan nusantara sebagai pengembangan faham *civic education* menjadi bekal hidup berbangsa dan bernegara bagi masyarakat yang ada di pesantren kabupaten Banyuwangi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya

5. Madrasah di pesantren kabupaten Banyuwangi bisa menyelaraskan tujuan pendidikannya dengan tujuan pendidikan nasional, sehingga ada keseimbangan berfikir dalam mendalami agama dan bermasyarakat
6. Madrasah di pesantren kabupaten Banyuwangi bersinergi dengan pemerintah, menanggulangi gerakan yang mengancam keutuhan NKRI.

B. Landasan Teori

1. Inovasi Kurikulum. Inovasi kurikulum berarti suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan (Sanjaya Wina. 2009). Kedudukan kurikulum penting pada proses pendidikan. Kurikulum memberikan arahan pada aktifitas pendidikan guna optimalisasi tujuan pendidikan. Kurikulum juga suatu rencana pendidikan, sebagai pedoman tentang jenis, ruang lingkup, isi, dan proses pendidikan (Sukmadinata. 2001).
2. Ciri-Ciri Inovasi Kurikulum. Ciri-ciri suatu inovasi yang dikemukakan oleh Rogers : (1) Adanya Keuntungan relatif (*Relative Advantages*), yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya; (2) Kompatibel (*compatibility*) dan adanya kesepahaman, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima; (3) Memiliki Derajat Kompleksitas (*complexity*), yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya; (4) Trialabilitas (*trialability*), artinya sampai sejauh mana suatu inovasi dapat diujicobakan keandalan dan manfaatnya; (5) Dapat diamati (*observability*), yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat.
3. Kalsifikasi pesantren dan Kurikulum Madrasah Pesantren
 - a. Klasifikasi pesantren. Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini membagi bentuk pondok pesantren menjadi empat bentuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang bantuan pondok pesantren menjadi 4 (empat): (1) Pesantren tipe A adalah pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional; (2) Pesantren tipe B adalah pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara

klasikal (madrasah); (3) Pesantren tipe C adalah pesanten yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar diluar; (4) Pesantren tipe D adalah pesantren yang menyelenggarakan sistem ponpes sekaligus sistem sekolah dan madrasah.

- b. Kurikulum Madrasah Pesantren. Menurut Abdurrahman Wahid, kurikulum yang berkembang dipesantren memperlihatkan pola yang tetap, pola tersebut dapat dilihat sebagai berikut: (1) Kurikulum itu ditujukan untuk mencetak ulama di kemudian hari; (2) Struktur kurikulum itu berupa pengajaran ilmu pengetahuan agama dalam segenap tingkatannya dan pemberian pendidikannya dalam bentuk bimbingan kepada santri secara langsung dari kyai/gurunya; (3) Secara universal, bahwa kurikulum pendidikan pesantren bersifat fleksibel, dalam artian setiap santri mempunyai kesempatan menyusun kurikulumnya sendiri sepenuhnya atau sesuai dengan kebutuhannya, bahkan dalam pesantren memiliki sistem pendidikan yang berbentuk sekolah. Realitas di lapangan bahwa sejak semula masing-masing madrasah diniyah *takmiliyah* atau biasa disebut madin dikembangkan di berbagai daerah dengan karakteristik dan kekhasan tersendiri menjadi kekuatan bagi penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal maupun nasional. Kurikulum madrasah diniyah disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu : (a) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) yang ditempuh dalam 4 (empat) tahun masa belajar dari kelas 1 hingga kelas 4 dengan 18 jam per minggu; (b) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar dari kelas 1 hingga kelas 2 dengan 18 jam per minggu; (c) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDTU) yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar dari kelas 1 hingga kelas 2 dengan 18 jam per minggu

4. *Civic Education*

Secara bahasa istilah *civic education* oleh beberapa pakar diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian *Civic Education* menurut beberapa ahli; Henry Randall Waiteyang dikutip Ruslina (2006:4) mendefinisikan bahwa *Civic*

Education adalah ilmu pengetahuan yang membahas hubungan seseorang dengan orang lain dalam perkumpulan yang terorganisir, hubungan seorang individu dengan negara. *Civic education* suatu bidang kajian yang mempunyai obyek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik.

Menurut Azyumardi Azra (2003) Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah pendidikan yang cakupannya lebih besar daripada pendidikan demokrasi dan HAM karena mencakup kajian yang lebih luas, seperti: pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan masyarakat madani, dan sebagainya.

C. Metode Penelitian

1. Model pengabdian dan penentuan fokus

Model pengabdian yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dalam pengabdian ini yang menjadi fokus utama pengabdian adalah inovasi kurikulum dalam mengimplementasikan *civic education*.

2. Lokasi/obyek pengabdian: Madrasah Diniyyah al-Amiriyyah Blokagung merupakan madrasah diniyah terbesar di kabupaten Banyuwangi.
3. Alat analisis yang digunakan SWOT

D. Hasil dan Pembahasan

Strategi Pelaksanaan Pendampingan Inovasi Kurikulum

1. Penggalan Data di Madrasah

Dimulai dengan observasi, pada tahap ini tim pengabdian mendatangi Madrasah Diniyah al-Amiriyyah Blokagung *notabene*

madrasah yang fokus pada pendidikan diniyah dan merupakan madrasah diniyah terbesar di kabupaten Banyuwangi dengan jumlah siswa lebih dari 5000 santri. Observasi yang dilakukan tim pengabdian pada awal sampai pertengahan bulan Juni 2018 ini menghasilkan beberapa temuan pada Madrasah Diniyah al-Amiriyyah Blokagung diantaranya yaitu:

- a. Telah memiliki sertifikat muadalah dengan nomor 2791 Mei tahun 2017
- b. Belum memiliki pedoman kurikulum, khususnya terkait materi *Civic Education*
- c. Belum memiliki tenaga ahli yang menguasai materi *Civic Education*
- d. Belum ada alokasi khusus yang memadai untuk pembelajaran materi *Civic Education*
- e. Pimpinan dan pengelolanya sangat mendukung pada implementasi materi *Civic Education*
- f. Telah ada kegiatan implementasi *Civic Education* berupa:
 - 1) Pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia oleh seluruh santri di halaman pesantren
 - 2) Pemasangan bendera merah putih di kantor madrasah
 - 3) Pemasangan gambar garuda pancasila, presiden dan wakil presiden di kantor madrasah dan di seluruh kelas
 - 4) Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya sebelum melaksanakan kegiatan seminar, pelatihan, *workshop* dan kegiatan resmi lainnya
 - 5) Memperingati hari-hari besar Nasional, misalnya: peringatan Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan Nasional, Hari santri dst.

Beberapa data hasil observasi di atas juga dilengkapi dengan hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait yaitu kepala madrasah, ustadz dan santri madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung:

- a. Kepala madrasah

Menurut kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung, *Civic Education* belum ada pedoman pembelajarannya, tapi dalam tataran implementasi sudah dilaksanakan dan didukung sepenuhnya.

“Kami memang belum punya pedoman Civic Education sebagai bahan ajar tapi kami sangat mendukung setiap kegiatan yang merupakan implementasi Civic Education, mulai dari upacara sampai peringatan hari besar nasional, pun menyanyikan lagu Indonesia raya sebelum kegiatan resmi dan memasang gambar garuda pancasila, presiden dan wakil presiden sekaligus mengibarkan bendera merah putih”.

Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Madrasah Diniyah Blokagung,

Sumber: Data Lapangan. 2018

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada kepedulian besar dari kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung dalam mendukung implementasi *Civic Education* sebagai bukti keterlibatan menggerakkan santri pada semangat cinta tanah air, Indonesia.

b. Ustadz

Keterangan yang disampaikan oleh ustadz Nizam Fahmi, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, terkait inovasi kurikulum, khususnya yang berbasis *Civic Education* adalah hal yang sangat diharapkan mengingat santrinya yang berasal dari banyak daerah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, maka sangat penting nilai-nilai yang ada pada *Civic Education* dibentuk pada suatu pedoman pembelajaran agar lebih mudah dalam penyampaian kepada santri, sehingga lebih mudah difahami dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari.

“Kami sangat berharap ada pembinaan dan pendampingan kepada kami untuk membuat pedoman kurikulum yang didalamnya juga mengakomodir kurikulum untuk mata pelajaran Civic Education karena santri madrasah diniyah al-Amiriyyah itu berasal dari seluruh daerah di kepulauan Indonesia, perlu diberikan penanaman nilai-nilai penting yang ada pada Civic Education, misalnya nilai persatuan, kebhinnekaan, kemanusiaan, gotong-royong dan sebagainya”.

Gambar 2 : Wawancara dengan Ustadz dan Santri Madrasah Diniyah Blokagung

Sumber: Data Lapangan. 2018

Keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Nizam Fahmi dalam tugasnya sebagai wakil kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung perlu didukung dengan kegiatan riil berupa pendampingan inovasi kurikulum oleh tenaga ahli, khususnya untuk materi *Civic Education* agar bisa mudah difahami dan diterapkan oleh santri dengan baik dan benar pada kehidupan santri yang majemuk dengan latar belakang daerah dari seluruh kepulauan Indonesia.

c. Santri

Ada banyak keinginan santri pada tim pengabdian yang terkait dengan pembelajaran *Civic Education*, diantaranya yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Himatul Muiyasaroh, santri kelas IV Ula, yaitu: adanya alokasi khusus pembelajaran *Civic Education*, materi *Civic Education* diberikan oleh tenaga ahli yang menguasai materi sekaligus punya metode yang baik dalam penyampainnya kepada santri agar mudah dimengerti, ada panduan khusus materi *Civic Education* yang disusun oleh tenaga ahli bersama stakeholder madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung, penyetaraan materi *Civic Education* dengan materi-materi yang disampaikan pada madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung karena materi ini sangat penting sebagai bahan untuk memupuk dan meningkatkan semangat cinta tanah air, Indonesia.

“Saya sangat berharap materi Civic Education itu punya jadwal sebagaimana matareai lainnya, selain itu gurunya juga harus ahli dan menguasai materi tersebut, ada panduannya dan materi Civic Education itu disetarakan dengan materi lainnya,

tujuannya agar santri termotivasi memahaminya seperti halnya semangatnya dalam memahami materi keagamaan Islam”.

Keinginan santri dalam pernyataan di atas, membuktikan motivasinya yang besar dalam turut serta pada gerakan cinta tanah air, maka keinginan tersebut sangat perlu untuk diakomodir dalam bentuk pendampingan inovasi kurikulum, khususnya pada penyiapan materi *Civic Education* berbentuk pedoman sekaligus sampai pada pendampingan pada implementasi materi tersebut dalam kehidupan santri dengan latarbekang yang heterogen.

2. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD ini dilaksanakan pada hari Kamis, 02 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat yayasan pesantren Darussalam Blokagung dengan peserta: (a) Pakar pendidikan (kurikulum) dan tim wawasan kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol); (b) Pengasuh dan kepala bidang pendidikan dan pengajaran pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi; (c) Ketua Robithoh Ma'ahidil Islamiyah (RMI) Banyuwangi; (d) Kepala bidang kepesantrenan pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi; (e) Kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi; (f) Tim pengabdian.

Hasil dari FGD tersebut adalah kesepakatan peserta dalam rencana pelaksanaan pendampingan inovasi kurikulum pada madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung, khususnya pada implementasi *Civic Education*. Hal ini mengingat madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung adalah madrasah terbesar di kabupaten Banyuwangi, sehingga menjadi rujukan dan barometer pendidikan diniyah di kabupaten Banyuwangi. Harapannya, kesuksesan pendampingan inovasi kurikulum pada implementasi *Civic Education* di madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung oleh tim ahli juga bisa menjadi motivasi pada madrasah diniyah di kabupaten Banyuwangi.

Pada FGD tersebut juga disepakati tanggal, peserta dan narasumber workshop inovasi kurikulum madrasah diniyah pada implementasi *Civic Education* yaitu tanggal 4-5 September 2018 dengan peserta pengelola dan ustadz/ustadzah madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung dan

pematerinya adalah : (1) Kepala Bakesbangpol dan tim wawasan kebangsaan kabupaten Banyuwangi; (2) Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pesantren (Kasi. PD. Pontren) Kementerian Agama kabupaten Banyuwangi; (3) Penerima Beasiswa dan Peserta Program Doktorat Manajemen Pendidikan Islam Pesantren IAIN Jember.

Selain kesepakatan tersebut juga disepakati tindaklanjut dari workshop inovasi kurikulum madrasah diniyah dalam implementasi *Civic Education*, yaitu pendampingan kepada pengelola madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung dalam rangka penyusunan pedoman materi *Civic Education*, sebagai bahan ajar ustadz/ustadzah kepada santrinya agar lebih mudah difahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari saat di tinggal pesantren maupun saat mereka sudah kembali ke kampung halamannya masing-masing.

3. Workshop inovasi kurikulum dalam Implementasi *Civic Education*

Pelaksanaan *workshop* inovasi kurikulum dalam implementasi *Civic Education* ini atas kerjasama *stakeholder* terkait diantaranya yaitu: (1) kepala madrasah Diniyah al-Amiriyyah Blokagung beserta seluruh stafnya; ketua Bakesbangpol beserta tim wawasan kebangsaan kabupaten Banyuwangi; (3) kepala kementerian agama kabupaten Banyuwangi beserta stafnya; (4) ketua RMI kabupaten Banyuwangi beserta stafnya; (5) tim pengabdian Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Pembukaan *workshop* inovasi kurikulum dalam implementasi *Civic Education* dihadiri oleh: (1) ketua *Robithoh Ma'ahidil Islamiyyah* (RMI) kabupaten Banyuwangi; (2) pengasuh pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi; (3) kepala bidang Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi; (4) kepala Bidang Kepesantrenan Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi; (5) Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni hari Selasa sampai Rabu, tanggal 4-5 September 2018, bertempat di Aula KH. Mukhtar Syafa'at pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi dengan jumlah peserta mencapai 80 orang terdiri dari: (1) kepala dan wakil kepala

madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung; (2) ustadz/ustadzah madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung; (3) perwakilan mahasantri Ma'had Ali Darussalam Blokagung; (4) perwakilan mahasiswa beasiswa madrasah diniyah Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Pertimbangan dari pelaksanaan workshop inovasi kurikulum dalam implementasi *Civic Education* selama dua ini adalah adanya aturan kebijakan dari pengasuh pesantren Darussalam Blokagung bahwa kegiatan ini difokuskan pada pagi sampai siang hari, mengingat siang-sore serta malam hari adalah kegiatan pesantren difokuskan pada pendidikan diniyah dan pengajian kitab salaf. Adapun materi, pemateri dan alokasi waktunya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Materi Workshop Inovasi Kurikulum dalam Implementasi *Civic Education*

Materi	Narasumber	Durasi
Kontribusi Madrasah Diniyyah dan Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia sebagai Benteng Moral dan Benteng Radikalisme	Drs. H. Mastur, M.Pd.I Kasi. PD. Pontren Kementerian Agama Banyuwangi	2 jam
<i>Civic Education</i> (Wawasan Kebangsaan) sebagai sebuah faham dan gerakan	Drs. Wiyono, M.H. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi	2 jam
Implementasi <i>Civic Education</i> dalam kemajemukan masyarakat Indonesia	Tim Wawasan Kebangsaan kabupaten Banyuwangi	2 jam
Inovasi Kurikulum Madrasah Diniyyah di Pesantren dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam	Siti Aimah, S.Pd.I., M.Si. Penerima beasiswa pada program Doktorat Manajemen Pendidikan Islam Pesantren IAIN Jember	2 jam

Sumber: Data Lapangan. 2018

Berikut ini adalah dokumentasi nya

Gambar 3 : Kepala Bakesbangpol dan Tim Wawasan Kebangsaan

Sumber: Data Lapangan. 2018

Antusias peserta dalam kegiatan workshop inovasi kurikulum dalam implementasi *Civic Education* ini sangat baik, tampak dari kedisiplinan

peserta dan semangatnya dalam mengikuti setiap sesi materi dari awal sampai akhir disertai dengan semangat mereka melalui banyaknya pertanyaan saat moderator membuka sesi tanya jawab. Bahkan peserta berharap kegiatan ini ada tindaklanjutnya, berupa pendampingan dalam penyusunan kurikulum berbasis *Civic Education*. Oleh karena itulah tim pengabdian Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi merekomendasikan harapan peserta tersebut kepada kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi untuk ditindaklanjuti bekerjasama dengan tim ahli dan stakeholder terkait.

Gambar 4 : Peserta Antusias Bertanya Pada Pemateri,

Sumber: Data Lapangan. 2018

4. Pelaksanaan Pendampingan Inovasi Kurikulum Dengan Penyusunan Kurikulum dalam Implementasi *Civic Education*

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari workshop inovasi kurikulum dalam implementasi *Civic Education* yang telah dilaksanakan pada tanggal 4-5 September 2018 atas kesepakatan stakeholder pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018. Atas kebaikan hati dan dukungan yang luar biasa dari kepala Bakesbangpol dan tim wawasan kebangsaan kabupaten Banyuwangi serta kasi. PD. Pontren kementerian agama Islam kabupaten Banyuwangi yang turut serta membantu dan mendampingi pengelola madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung dalam penyusunan pedoman *Civic Education* sebagai bahan ajar ustadza/ustadzah kepada santri.

Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari mulai Senin-Rabu, tanggal 10-12 September 2018 bertempat di kantor madrasah diniyah al-

Amiriyyah Blokagung. Adapun peserta dalam penyusunan pedoman *Civic Education* ini adalah: (1) kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung; (2) wakil kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung bidang kurikulum tingkat Ulya; (3) wakil kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung bidang kurikulum tingkat Wustho; (4) wakil kepala madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung bidang kurikulum tingkat Ula; (5) ustadz dan ustadzah materi akhlaq (moral/etika); (6) kader ustadz/ustadzah materi *Civic Education*; (7) perwakilan mahasantri Ma'had Ali Darussalam Blokagung. Sementara itu pendamping dalam penyusunan pedoman *Civic Education* adalah Tim Wawasan Kebangsaan kabupaten Banyuwangi, Kasi. PD. Pontren kabupaten Banyuwangi dan peserta program doktoral manajemen pendidikan Islam pesantren IAIN Jember.

Hasil dari penyusunan pedoman materi *Civic Education* ini berjenjang sesuai jenjang di madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung dan menyesuaikan dengan lampiran permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu: Ula, Wustho dan Ulya. Adapun ruang lingkup materi pada pedoman *Civic Education* adalah sebagai berikut:

Pedoman *Civic Education* tingkat ula: (a) persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi; hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan; (b) norma, hukum dan peraturan, meliputi; tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

Pedoman *Civic Education* tingkat wustho: (a) Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi; hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM; (b) kebutuhan warga negara, meliputi; hidup gotong royong, harga diri sebagai sebagai warga

masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara; (c) konstitusi negara, meliputi; proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.

Pedoman *Civic Education* tingkat ulya: (a) kekuasaan dan politik, meliputi; pemerintahan desa dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi; (b) pancasila, meliputi; kedudukan pancasila sebagai dasar negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka; (c) globalisasi meliputi; globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di erdan organa globalisasi, dampak globaliasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Dari beberapa paparan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum madrasah di pesantren dalam implementasi *Civic Education* itu penting mengingat pendidikan keagamaan Islam di pesantren mempunyai kontribusi besar pada penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sebagai benteng moral sekaligus benteng radikalisme. Dukungan yang baik dari *stakeholder* internal dan eksternal juga merupakan motivasi besar pada kelancaran dan kesuksesan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis madrasah ini. Antusias peserta dan pengelola madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi yang sangat baik juga merupakan energi positif yang memotivasi tim pengabdian Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi untuk terus berupaya maksimal dalam pendampingan inovasi kurikulum madrasah dalam mengimplementasikan *Civic Education* bersama stakeholder dan para ahli dalam kegiatan pendampingan dan pengabdian pada madrasah diniyah terbesar

di kabupaten Banyuwangi yang harapannya bisa menjadi rujukan serta barometer bagi madrasah diniyah se-kabupaten Banyuwangi.

2. Rekomendasi

- a. Kepala Bakesbangpol dan Tim Wawasan Kebangsaan kabupaten Banyuwangi

Melanjutkan kerjasama dengan madrasah diniyah dan pesantren se-kabupaten Banyuwangi dalam gerakan sosialisasi wawasan kebangsaan agar santri memahami dengan baik materi *Civic Education* sehingga mampu mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, baik saat di pesantren berkumpul dengan temannya dari seluruh penjuru daerah Indonesia, maupun saat pulang ke daerahnya masing-masing.

- b. Kasi. PD. Pontren kementerian agama kabupaten Banyuwangi

Memberikan pembinaan yang baik secara berkala dan berkelanjutan pada pendidikan diniyah baik yang dikelola oleh madrasah diniyah maupun yang dikelola oleh pesantren, mengingat afiliasi pendidikan diniyah pada kementerian agama, maka sangat besar pengaruh dan arti perhatian serta pembinaan kementerian agama pada pendidikan diniyah di madrasah maupun di pesantren untuk pengakuan dan perkembangannya.

- c. Pengelola madrasah diniyah al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi

Melakukan inovasi kurikulum sesuai regulasi dari pemerintah dan terus membangun kerjasama dengan stakeholder terkait, supaya pendidikan diniyah yang dilaksanakan mendapat pengakuan dan pembinaan yang baik oleh stakeholder dan para ahli, sehingga mutu pendidikannya terus bisa dikembangkan dan berkontribusi besar pada pengembangan sumberdaya manusia Indonesia, khususnya pada unsur pendidikan moral dan wawasan kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2003. "Kata Pengantar", dalam Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarnegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syahid-TAF-Prenada Media.
- Rogers, Everett. 1983. *Diffusion of Innovation Third Edition*. New York: The Free Press

- Sanjaya, 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Wahid, Abdurrahman. tt. *Kurikulum Pesantren dan Penyediaan Lapangan Kerja “Dalam Bunga Rampai Pesantren”*, Jakarta: CV Dharma Bhakti.
- Ruslina. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Pontianak: IAIN Pontianak Press.